



BUPATI PURBALINGGA

PIDATO BUPATI PURBALINGGA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2013 *Purbalingga, 27 Maret 2014*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Bapak Ketua, para Wakil Ketua serta Bapak-Ibu segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Yth. Bapak/Ibu Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah / MUSPIDA Kabupaten Purbalingga;
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD beserta segenap Jajaran Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Yth. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
- Para Tamu Undangan dan segenap Hadirin yang kami muliakan.

Mengawali laporan ini, ijinkanlah kami mengajak kepada segenap hadirin untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rakhmat dan hidayahNya jualah, maka pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Acara ***”Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013”***.



Melalui kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kewajiban konstitusional ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak / Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD, serta seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir bersama para Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis atas penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selama satu tahun terakhir yang laporan singkatnya akan kami bacakan ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban / LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban /LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat”.

Dalam pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dimaksud juga diatur bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga sesuai keputusan Badan Musyawarah DPRD, penyampaian LKPJ tersebut diagendakan pada hari ini, Kamis, 27 Maret 2014.

Mengacu pada ketentuan tersebut, melalui kesempatan ini



perkenankanlah kami menyampaikan Resume Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2013 yang merupakan laporan tahun pertama saya sebagai Bupati Purbalingga menggantikan Drs.H.Heru Sudjatmoko, M.Si (yang telah terpilih dan dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah) untuk mengemban amanat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di segala bidang di Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2010 -2015.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, kami telah menyusun laporan dimaksud secara sistematis dalam bentuk 2 (dua) buku yang terdiri atas :

- a. *Buku Pertama*, berisi Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban / LKPJ Bupati Purbalingga yang sedang kami bacakan saat ini.
- b. *Buku Kedua*, berisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2013, dimana sesuai dengan Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Kebijakan Pemerintahan Daerah.
 - Bab III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bab IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Bab V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - Bab VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
 - Bab VII : Penutup.

Selain dua buku tersebut diatas, LKPJ dilengkapi pula dengan dokumen berupa rekaman penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2013 meliputi : Buku Himpunan Produk Hukum Daerah, Himpunan Piagam Penghargaan serta Himpunan Laporan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana dimaklumi bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan diarahkan pada upaya pencapaian /perwujudan visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, yakni **“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”**.

Dengan demikian, maka Visi dimaksud merupakan arah dan pedoman bagi segenap lapisan dan komponen masyarakat serta seluruh jajaran aparatur pemerintahan daerah dalam berkarya, menjadikannya sebagai ruh dan semangat kejuangan dalam meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan serta kemajuan masyarakat melalui geliat dan dinamika otonomi daerah.

Selaras dengan visi, misi dan strategi serta tema pembangunan nasional yang ditetapkan yakni *“Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”*; maka Tema Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD Tahun 2013 adalah *“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia dan Pemenuhan Hak Dasar Rakyat”*.

Sesuai dengan tema tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2013 adalah:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik,
- 2) Pembangunan Pendidikan,
- 3) Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana,
- 4) Pembangunan Perdesaan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat,
- 5) Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas,
- 6) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi,
- 7) Pengembangan Usaha Perdagangan,
- 8) Pengembangan Investasi dan Pembangunan Ketenagakerjaan,
- 9) Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya,
- 10) Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan,



- 11) Pembangunan Infrastruktur,
- 12) Pembangunan Lingkungan Hidup.

Keseluruhan prioritas dimaksud diselenggarakan melalui penatausahaan 34 urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan kami laporkan secara lengkap dan rinci dalam Buku II LKPJ ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Secara garis besar dilaporkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara operasional dibiayai dengan APBD Tahun Anggaran 2013, dapat terselenggara dengan baik dan optimal melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang dibebankan dan menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Disamping pendanaan yang tertuang dalam APBD Kabupaten, pembangunan Purbalingga juga ditopang dengan dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, kinerja Satuan Kerja / Satker Vertikal, maupun dana bantuan sosial dan hibah yang diterimakan langsung kepada pemerintah desa dan kelompok swadaya masyarakat.

Disamping untuk pemenuhan kebutuhan rutin berupa anggaran belanja operasional dan belanja pegawai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di segala bidang, Kebijakan Umum Belanja Daerah TA. 2013 diarahkan untuk peningkatan stimulus guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar sosial ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Kita patut bersyukur bahwa sejak tahun 2011, kemampuan APBD kita terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan peningkatan APBD tersebut, alokasi anggaran



urusan pekerjaan umum juga terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2010 hanya sekitar **Rp.18,212** milyar; **Rp.85,195** milyar pada tahun 2011; **Rp.134,4** milyar pada tahun 2012; dan **Rp.202,478 milyar pada tahun 2013**.

Terkait hal dimaksud, Tahun 2013 kita sebut sebagai “*Tahun Pembangunan*” karena kita tidak saja mampu memperbaiki infrastruktur rusak yang pernah kita bangun, namun juga menambah infrastruktur baru yang bersifat strategis yang harapannya dapat semakin meningkatkan aksesibilitas warga kita dalam mengeksplorasi sumberdaya sosial dan ekonomi di wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga juga semakin banyak mendapatkan berbagai penghargaan sebagai bukti pengakuan pihak luar atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Jumlah penghargaan yang diraih pada tahun 2013 sebanyak 19 (Sembilan belas) penghargaan, baik tingkat nasional, provinsi maupun dari lembaga swasta, antara lain:

- 1) Pelaksana Terbaik Harapan III Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) dan Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah.
- 2) Pelaksana Terbaik 1 Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pakarti Utama 1 Tingkat Nasional, Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK) Kategori Kabupaten Tahun 2013, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Umum TP PKK.
- 4) Penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Atas Jasa dan Dharma Nakti Dalam Memajukan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- 5) Juara III Kategori Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, Gubernur Jawa Tengah.



- 6) Peringkat III Kelompok Prio Utomo Pemenang Lomba Petugas Lapangan KB, Gubernur Jawa Tengah.
- 7) Juara I Kategori Pos Penyuluhan Perdesaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
- 8) Juara I PD BPR BKK Terbaik Dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Gubernur Jawa Tengah.
- 9) ***The Best Sharia Finance Bank***, dengan predikat Sangat Bagus Kinerja Keuangan 2012, Infobank (Analisis, Strategi Perbankan dan Keuangan).
- 10) Penghargaan untuk Komitmen dan semangat untuk terus menanam dengan lestari oleh kaum perempuan dalam Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara, Ibu Negara Republik Indonesia Hj. Ani Bambang Yudhoyono.
- 11) Citra Pesona Wisata Awards 2013 Pemenang Terbaik Daya tarik Wisata Buatan Berwawasan Lingkungan Tingkat Nasional, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- 12) *Indonesian Hospital Managemen Awards/IHMA* Pemenang Terbaik I PERSI AWARD-IHMA 2013 Kategori *Hospital Family Planning Project*, Kepala BKKBN Republik Indonesia dan Ketua Komite Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
- 13) Stakeholder Pariwisata Kelompok Daya Tarik Wisata dalam rangka mendukung secara aktif pelaksanaan Visit Jateng 2013, Gubernur Jawa Tengah.
- 14) *The Most Improved Travel Club Tourism Awards 2013*, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- 15) Penghargaan Adipura Tahun 2013 (Kategori Kota Kecil), Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- 16) Peringkat 5 Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tahun 2011, Menteri Dalam Negeri.

Rapat Paripurna Dewan yang Berbahagia.

Selanjutnya secara garis besar akan disampaikan berbagai kebijakan, program dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan tugas desentralisasi baik yang bersifat wajib maupun pilihan, serta



pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Guna memudahkan dalam penyimakannya, maka uraian dimaksud diurutkan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Reformasi Birokrasi), difokuskan pada peningkatan profesionalisme aparatur dan Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah;

Pembangunan administrasi ditujukan untuk lebih memantapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan sistem manajemen kepegawaian, sistem perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yang diikuti dengan *reward* dan *punishment*, dalam rangka menciptakan *clean and good government*.

Sedangkan program dan kegiatan menonjol yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan kompetensi SDM PNS dan Anggota DPRD melalui kegiatan diklat, bintek, kursus, *workshop*, dan sebagainya. Disamping itu, terus diupayakan peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran melalui mekanisme *at cost* dengan berpedoman pada standar satuan harga, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik, pengukuran indeks kepuasan masyarakat, pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintahan melalui penyusunan LAKIP, penetapan kinerja, penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintahan tingkat kabupaten, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan koordinasi pimpinan daerah, pembinaan jasa usaha konstruksi, penyusunan *road map* dan dokumen usulan reformasi birokrasi, serta publikasi dan dokumentasi berbagai kegiatan pemerintahan daerah.

2. Pembangunan Pendidikan, yang difokuskan pada semakin terjaminnya akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, penerapan pendidikan menyeluruh yang tidak hanya mengutamakan aspek intelektual, melainkan juga kemampuan interaksi sosial dan interpersonal, pendidikan watak dan budi pekerti, nasionalisme,



pendidikan vokasi dan ketrampilan, serta pendidikan keterampilan dan kewirausahaan pada sekolah umum.

Alokasi anggaran belanja langsung urusan pendidikan mencapai Rp.75.703.342.000,- (15,34%) dari total anggaran belanja daerah langsung yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2013.

Urusan pendidikan masih merupakan prioritas pendanaan guna mewujudkan kemajuan di bidang pendidikan yang diyakini sebagai salah satu upaya menggapai kesejahteraan bangsa. Meskipun demikian, harus kita sadari pula bahwa seberapapun alokasi dana yang dikucurkan, tidak akan pernah bisa mencukupi karena kebutuhan yang terus meningkat.

Dalam kaitan ini, peran orang tua murid melalui komite sekolah masih diharapkan partisipasinya dalam ikut serta melaksanakan pembiayaan pendidikan secara proporsional yang diimbangi dengan keterbukaan pihak sekolah dalam pengelolaan, hal ini merupakan faktor kunci bagi kemajuan sekolah dalam melaksanakan tugas mencerdaskan dan mendidik anak bangsa khususnya di Kabupaten Purbalingga.

Disisi lain, komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan tenaga guru melalui program sertifikasi, semakin diperketat mekanisme, persyaratan maupun evaluasinya. Hal ini dimaksudkan agar pemberian tunjangan sertifikasi dapat meningkatkan kualitas dan peran guru secara nyata sehingga sungguh-sungguh berkorelasi positif secara signifikan bagi peningkatan prestasi dan kemajuan dunia pendidikan kita.

Kinerja pendidikan yang dapat diraih diperlihatkan oleh berbagai indikator antara lain :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) mencapai 52,81% (24,284 anak dari 45,980 anak usia 4 – 6 tahun).
- 2) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 98,73%.
- 3) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 74,69%.
- 4) Peningkatan banyaknya guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 77,26% atau 7.663 guru dari 9.918 guru.



- 5) Rasio ketersediaan sekolah dasar yaitu perbandingan antara jumlah sekolah dasar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia pendidikan dasar sebesar 1 : 253.
- 6) Rasio guru per murid yaitu perbandingan antara jumlah guru dibandingkan dengan murid yaitu 1 guru : 17 Murid. Dalam rangka mewujudkan kecukupan jumlah guru sesuai kompetensinya, terus ditempuh upaya pemetaan kebutuhan guru serta upaya penyebarannya secara merata.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan menengah yang lebih diarahkan pada tersedianya tenaga terampil yang siap memasuki lapangan kerja dan usaha, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mengupayakan pendirian gedung unit sekolah baru SMK serta mendorong SMK swasta agar terus berkembang untuk bersama-sama mencerdaskan anak bangsa.

Selain mengembangkan SMK yang sudah operasional, sebagian SMK yang masih menginduk karena belum tersedianya bidang tanah, terus dicarikan solusinya sehingga ke depan diharapkan agar seluruh SMK yang ada dapat beroperasi sebagaimana mestinya untuk melaksanakan perannya dan diharapkan dapat berperan secara optimal. Disamping itu, dalam rangka memfasilitasi keluarga kurang mampu yang berprestasi, maka mulai tahun ajaran 2013/2014 SMKN 3 Purbalingga sudah mulai beroperasi.

Dalam hal pengembangan ketrampilan pendidikan non-formal, antara lain telah dilakukan Pengembangan ketrampilan melalui Bantuan Kewirausahaan Desa (BKD), Pengembangan ketrampilan melalui KBU (Kelompok Belajar Usaha), dan pengembangan ketrampilan melalui kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Dalam upaya perwujudan masyarakat yang berakhlak mulia melalui pembangunan pendidikan dan agama, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didukung dari dana APBD, termasuk dukungan operasionalisasi program dan kegiatan



pendidikan keagamaan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Pusat melalui Kantor Kementerian Agama.

Dalam kaitan ini, dalam era globalisasi, teknologi informasi bagaikan pedang bermata dua yang memerlukan kewaspadaan dan kewaskitaan untuk memaksimalkan manfaatnya secara positif dan menekan sebesar mungkin dampak negatifnya. Banyak kasus kejahatan dan kenakalan anak dipicu dan terprovokasi dari kemudahan informasi melalui internet. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami tidak henti-hentinya mengingatkan dan mengajak kepada semua orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar terus meningkatkan kiprah dan perannya dalam ikut serta menjaga dan mengawal putra putrinya mengarungi situasi sosial yang terus berubah secara dinamis, utamanya melalui pola anutan dan contoh serta suri teladan yang membanggakan.

Kita harus yakin dan percaya bahwa melalui pola anutan yang baik, pengawasan yang efektif dari masyarakat, sinergis dengan berbagai upaya formal yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah, maka akan tercipta benteng pertahanan mental ideologis yang prima dalam memfilter pengaruh negatif budaya luar yang tidak cocok dengan kepribadian dan jati diri asli masyarakat kita.

3. Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Dalam hal pembangunan kesehatan, pada Tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.88.506.885.000,00 (17,93%) dari total anggaran belanja langsung). Kebijakan yang ditempuh adalah melanjutkan dan memantapkan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Fokus prioritas ini adalah peningkatan dan kualitas layanan kesehatan dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata

Secara umum pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang menunjukkan kinerja baik antara lain meliputi Cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan



pelayanan nifas, Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan desa/ kelurahan universal child ummunization, Cakupan pelayanan balita, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, Cakupan penjangangan siswa SD/ setingkat, Cakupan peserta KB aktif, Cakupan penemuan dan perawatan penderita penyakit, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level I, serta Cakupan desa siaga aktif, sudah mencapai target MDGs dan SPM Bidang Kesehatan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui Jaminan Kesehatan Nasional/JAMKESMAS, program unggulan daerah berupa Jaminan Kesehatan Daerah/ JAMKESDA sebagai pembelajaran pembiayaan kesehatan secara mandiri dan peningkatan kepedulian sosial bagi sesamanya menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam situasi yang cukup sulit tersebut, kepesertaan JAMKESDA pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 160.591 keluarga yang terdiri dari 138.620 keluarga masyarakat miskin non kuota Jamkesmas dan 21.971 keluarga mampu dengan membayar premi sebesar Rp.120.000,-/KK/Tahun, dengan dana masyarakat yang terhimpun sebesar Rp.2.636.520.000,-. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota Jamkesmas di Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten dan Rumah Sakit Provinsi, Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan dana sebesar Rp.1.491.416.000,-.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kader-kader kesehatan di seluruh pelosok Purbalingga yang telah dengan gigih menggelorakan dan mensosialisasikan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah diraih dan dibuktikan oleh capaian angka indikator dan berbagai



penghargaan yang telah diterima kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama ini, tentu menjadi beban dan sekaligus tantangan tersendiri bagi seluruh jajaran birokrasi dan segenap komponen masyarakat untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerjanya di masa-masa yang akan datang.

Dalam rangka memantapkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, kebijakan lain yang telah ditempuh adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk pada tingkatan ideal; sehingga diharapkan agar setiap hasil pembangunan dapat berdampak positif secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 menunjukkan angka yang cukup terkendali, yakni sebesar 1,46%.

4. Pembangunan Perdesaan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, difokuskan pada pemantapan otonomi desa, pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin serta pemantapan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal, peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin serta Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

Dalam upaya Percepatan Pembangunan Perdesaan, berbagai program dan kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap kemajuan perdesaan terus dilaksanakan dan dimantapkan, yaitu meliputi : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat / PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan; Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender / P2MBG, Program Padat Karya Pangan / PKP, Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin / PSPR Gakin, Bantuan stimulan Perumahan Swadaya /BSPS Kemenpera, TNI Manunggal Membangun Desa / TMMD, Alokasi Dana Desa / ADD dan Alokasi Anggaran Kelurahan / AAK, Bantuan Permodalan RT, serta Bantuan Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat atau PAMSIMAS dan SIPAS.

Dalam hal penguatan aparatur dan kelembagaan pemerintahan Desa, telah dilaksanakan kegiatan antara lain : BinteK administrasi pemerintahan desa, fasilitasi mutasi tanah kas



desa, fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan desa serta pemilihan Kepala Desa di 154 Desa.

Total alokasi anggaran dari berbagai program pembangunan perdesaan tersebut diatas, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2013 telah mencapai Rp.84.946.400.000,-.

Melalui berbagai kegiatan pembangunan perdesaan untuk memantapkan otonomi desa telah berhasil meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perdesaan serta kegiatan ekonomi produktif yang semakin baik dan sangat berguna dalam menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

5. Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas, difokuskan pada upaya pewujudan kedaulatan pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Dalam hal produktivitas pertanian, kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Purbalingga masih mampu mencapai luas panen 38.934 hektar dengan produktivitas 57,33 Kwintal/hektar dengan produksi 223.225 ton Gabah Kering Giling setara dengan 141.078 ton beras atau surplus 66.074 ton beras.

Hal dimaksud tidak terlepas dari berbagai upaya kita dalam Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian serta Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian melalui berbagai kegiatan antara lain sekolah lapang pertanian, optimalisasi lahan sawah, rehabilitasi JIUT/JIDES, dan pembangunan embung/dam/parit. Sektor pertanian juga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 29,88 persen. Demikian pula sub sektor perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan terus digalakkan untuk mendukung pemanfaatan potensi alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, difokuskan pada fasilitasi permodalan, pengembangan dan peningkatan produktivitas peningkatan daya saing, serta



peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Pembinaan pengembangan koperasi dan UKM telah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari jumlah koperasi aktif yang dibina sejumlah mencapai 91 % (219 koperasi dari 240 koperasi yang ada dan berbadan hukum) dan Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 170.779 (atau 99,77% dari jumlah seluruh UKM yang ada sejumlah 171.166). Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui Program Subsidi Bunga, *Forum for Economic Development Employment and Promotion/FEDEP*, Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM serta Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM.

7. Pengembangan Usaha Perdagangan, dengan fokus kepada pemantapan usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah melalui revitalisasi pasar tradisional dan pengaturan toko modern.

Pembinaan usaha perdagangan pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan tersalurnya barang dari produsen ke konsumen dalam jumlah yang cukup, merata, aman dan dengan harga terjangkau. Upaya pemenuhan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan harga, pengawasan distribusi barang penting dan barang pokok lainnya, serta pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Selain itu juga dilakukan pula berbagai upaya antara lain revitalisasi pasar tradisional dan pengaturan pasar modern serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Capaian kinerja Urusan Perdagangan antara lain ditandai dengan kontribusinya terhadap PDRB sesuai harga berlaku sebesar 16,96%. Nilai ekspor bersih perdagangan pada tahun 2013 sebesar Rp.1.357.957.424.792,53.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain fasilitasi pasar lelang dan pasar murah, pengawasan dan pengendalian distribusi barang penting dan strategis, Rehabilitasi Pasar Tradisional, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD, Pengelolaan, Pemeliharaan dan rehabilitasi pasar tradisional secara bertahap. Dalam hal ini, pasar tradisional yang telah dibangun adalah pasar Arjobinangun



Bojong dan Pasar Bobotsari dimana khususnya pasar Bobotsari, pembangunannya masih dilanjutkan di TA. 2014 menggunakan dana DAK. Dalam rangka perlindungan pasar tradisional ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih konsisten untuk tidak menerbitkan ijin pendirian toko modern utamanya yang berskala besar.

Dari segi anggaran, alokasi anggaran belanja langsung urusan perdagangan mencapai Rp.10.355.837.000,- (2,10%) dari total anggaran belanja daerah langsung APBD Tahun 2013.

8. Pengembangan Investasi dan Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan fokus pada pengembangan dan penguatan industri padat karya, penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang semakin kondusif, peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.

Dalam rangka peningkatan kegiatan usaha dan investasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk selalu mengembangkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, serta mendorong peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Sesuai komitmen tersebut, berbagai upaya fasilitasi, pemberian berbagai insentif kemudahan perijinan untuk menarik investor dan pengembangan dunia usaha terus ditingkatkan. Total nilai investasi tahun 2013 sebesar Rp.505.357.542.500,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.162.857.542.500,- dibanding capaian tahun 2012 sebesar Rp.342.500.000.000,-.

Dalam hal urusan perindustrian, kebijakan dasar yang ditempuh adalah pembangunan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta untuk mengurangi pengangguran dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan urusan perindustrian telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :



- 1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11,17 % dari total PDRB sebesar Rp. 7.298.610,75
- 2) Pertumbuhan industri menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,089%, pada tahun 2012 jumlah industri sebanyak 39.240 industri sedangkan pada tahun 2013 menjadi 39.275 industri.

Disamping fasilitasi terhadap industri skala besar, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah melalui pembinaan manajemen dan aplikasi teknologi terapan.

Di bidang Ketenagakerjaan, tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2013 Upah Minimum Kabupaten / UMK Purbalingga ditetapkan sebesar Rp.896.500,- (naik 9,53 persen) dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp.818.500,-. Jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 3.123 orang dimana 22,37 persen-nya / 13.959 orang disalurkan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga.

Meskipun demikian, disadari bahwa belum semua perusahaan dapat menerapkan ketentuan UMK tersebut karena berbagai kendala. Demikian pula kepesertaan JAMSOSTEK masih dalam kisaran 29.572 pekerja / 66,97 persen, serta masih cukup tingginya angka pengangguran karena pertumbuhan perusahaan yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Dengan kemudahan investasi serta ketersediaan infrastruktur yang memadai, ke depan diharapkan agar jumlah perusahaan terus meningkat utamanya perusahaan yang menyerap tenaga kerja laki-laki. Seiring dengan berkembangnya kinerja perusahaan, maka ketentuan normatif tentang hak-hak pekerja lainnya diharapkan semakin dapat dipenuhi sehingga kebijakan pro investasi yang telah ditempuh selama ini benar-benar berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

9. Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya, difokuskan pada pengembangan obyek wisata, pembinaan seni budaya daerah di masyarakat maupun siswa sekolah.

Secara empiris, pariwisata telah memberikan berkah tersendiri bagi Kabupaten Purbalingga. Disamping berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, sektor ini juga telah semakin menegaskan peta Kabupaten Purbalingga secara nasional sebagai daerah kunjungan wisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 2,05% dari total PDRB Kabupaten Purbalingga sebesar 7.298.610,75.

Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sebanyak 1.458.513 orang jumlah ini meningkat dibandingkan kunjungan tahun 2012 yang mencapai 1.288.222 orang.

Mudah-mudahan, dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian nasional, dan telah tercukupinya infrastruktur dasar perhubungan yang semakin baik, serta gencarnya promosi pariwisata melalui program Visit Jateng 2013, diharapkan destinasi wisata semakin berkembang.

Dalam hal Urusan Kebudayaan, peran pembinaan kita masih terbatas melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, pentas seni uyon-uyon dan wayang kulit secara rutin, serta perawatan dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Guna mengoptimalkan upaya pembinaan dimaksud, pendaya gunaan GOR Mahesa Jenar sebagai tempat pentas seni diharapkan menjadi solusi. Dalam kaitan ini, saya menghimbau kepada seluruh jajaran aparaturnya pemerintah serta semua lapisan masyarakat untuk bisa menyaksikan setiap pentas seni dan budaya tersebut.

10. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Dalam bidang pembinaan pemuda dan olah raga dapat disampaikan bahwa melalui kebersamaan dengan komponen keolahragaan masyarakat dengan memanfaatkan sarana yang telah dibangun, prestasi keolahragaan secara perlahan mulai menampakkan hasilnya, baik di cabang sepak bola dengan Persibangga-nya maupun cabang-cabang olah raga lainnya.



Fakta yang demikian ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dengan dukungan dana APBD yang relatif kecil, namun dengan dukungan dan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan sarana olah raga yang ada, maka prestasi yang diharapkan tetap bisa diwujudkan dan patut dibanggakan. Ke depan, kemandirian pembiayaan olah raga agar didorong pula melalui peran dunia usaha yang semakin besar.

11. Pembangunan Infrastruktur difokuskan pada peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah dan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi untuk menunjang peningkatan produksi pertanian.

Penyediaan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas diarahkan untuk mendorong terjaminnya kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur perkotaan maupun perdesaan yang dapat mendukung perputaran roda perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan pekerjaan umum termasuk didalamnya irigasi, keciptakaryaan dan lain sebagainya pada tahun 2013 sebesar Rp.202.478.562.000,- (41,03 persen dari total belanja langsung APBD 2013). Sedangkan realisasinya hanya mencapai 79,31%. Hal ini tercermin dalam kinerja pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan metode pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 sejumlah 208 kegiatan, terlelang sejumlah 183 kegiatan, gagal lelang sejumlah 21 kegiatan dan tidak dilelang sejumlah 16 kegiatan serta yang putus kontrak sebanyak 8 kegiatan.

Untuk mengatasi kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2013 berupa 21 kali kejadian angin ribut, 16 kejadian tanah longsor, 1 kali kejadian banjir, dan 30 kali terjadi kebakaran rumah telah dilakukan upaya tanggap darurat oleh SKPD terkait bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan dibantu jajaran TNI/POLRI serta diikuti pemberian bantuan/ santunan. Sedangkan untuk penanganan dan perbaikan infrastruktur yang



rusak akibat bencana dilakukan melalui kegiatan penanganan pasca bencana secara bertahap, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi Jawa Tengah serta APBN.

12. Pembangunan Lingkungan Hidup, difokuskan pada Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengambilan fungsi kawasan lindung, pelestarian sumber daya genetik, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.

Realisasi pelaksanaan program / kegiatan bidang lingkungan hidup, antara lain konservasi lahan, pembangunan sumur resapan, tersedianya IPAL UKM, biogas, biodigester, penanaman pohon, serta penataan taman alun-alun / pusat kota. Berkenaan dengan optimalisasi pembangunan lingkungan hidup, kegiatan strategis yang terus dikawal adalah perwujudan Purbalingga sebagai Kota Hijau.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Penyusunan *Master Plan Up Scaling* RTH Perkotaan Purbalingga, sosialisasi RTH, Pembentukan komunitas hijau di tingkat kelurahan/desa serta penyelenggaraan aksi dan festival yang dilaksanakan oleh komunitas hijau serta penyusunan DED dan pembangunan hutan kota depan SMK Negeri 3 Purbalingga.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, sambil menunggu selesainya proses audit / pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, perkenankanlah kami menyampaikan secara garis besar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD atau Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Tahun Anggaran 2013. Komposisi APBD terdiri dari

- a. Anggaran pendapatan sebesar Rp.1.168.189.497.000,- dan anggaran belanja sebesar Rp.1.240.345.692.000,- sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.72.156.195.000,-.
- b. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.84.232.950.000,- dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.12.076.755.000,- sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.72.156.195.000,- yang direncanakan untuk menutup defisit anggaran.

2. Realisasi APBD :

- a. Anggaran Pendapatan terealisasi sebesar Rp.1.186.532.497.797,- terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi sebesar Rp. 122.858.738.938,- atau 109,40%,
 - 2) Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp.830.569.180.496,- atau 99,92% serta
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp.233.104.578.363,- atau 103,74%.
- b. Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp.84.979.690.526,- atau 100,89% dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp.12.076.753.746,- atau 100% sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp.72.902.936.780,-.
- c. Anggaran Belanja terealisasi sebesar Rp.1.126.557.032.701,-.

Berdasarkan realisasi APBD tersebut, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.132.878.401.876,- yang berasal dari Surplus Anggaran sebesar Rp.59.975.465.096,- ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp.72.902.936.780,-.

Secara keseluruhan, dalam TA. 2013, tercatat adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah / PAD sebesar Rp.10.110.530.681,- (8,97%), yakni dari Rp.112.755.698.257,- pada tahun 2012 menjadi Rp.122.866.228.938,- pada tahun 2013, bahkan melampaui target tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp.112.298.239.000,-. Hal ini disebabkan beberapa sumber pendapatan mencapai lebih dari 100%.

Meskipun secara keseluruhan realisasi PAD TA.2013 mengalami pelampauan, akan tetapi terdapat permasalahan utama di



bidang pendapatan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini antara lain, antara lain :

- (1) Belum tersedianya data potensi beberapa sumber pendapatan asli daerah yang valid;
- (2) Terbatasnya obyek pajak dan retribusi sehingga terbatas dalam upaya melakukan ekstensifikasi pajak;
- (3) Belum optimalnya upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- (4) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam penyertaan modal kepada BUMD;
- (5) Kurangnya SDM aparat pemungut pajak dan retribusi daerah;
- (6) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Kami laporkan pula bahwa dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Tim Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga termasuk 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nominasi terbaik dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan Kabupaten Jepara, Semarang, Kudus, Kota Surakarta, Semarang dan Tegal. Dengan demikian Kabupaten Purbalingga termasuk 4 (empat) besar terbaik dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten di Jawa Tengah.

Berdasarkan penilaian tersebut, kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan dukungan penuh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dan seluruh komponen masyarakat Purbalingga mendapatkan apresiasi. Hal ini juga menunjukkan dan membuka mata kita semua bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum tidak jelek, tapi justru sangat baik. Dari hasil evaluasi tersebut Kabupaten Purbalingga mendapatkan hasil yang sangat menggembirakan yaitu ranking 5 (lima) nasional dari 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) Kabupaten di seluruh Indonesia yang mempunyai kinerja baik di Tahun 2011. Sehingga pada tanggal 25 April 2013 kami mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima penghargaan dan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia pada hari Otonomi



Daerah.

Pada Tahun 2014 ini saya juga mohon doa restu dari Bapak/Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Purbalingga, dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 Kabupaten Purbalingga masuk nominasi 10 (sepuluh) besar Kabupaten yang mempunyai kinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Insyaallah pada peringatan hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2014 nanti juga akan menerima Penghargaan dan Apresiasi dari Presiden Republik Indonesia. Sebab Kabupaten Purbalingga bersama dengan Kabupaten Jepara sudah masuk 10 (sepuluh) besar nasional dari 414 (empat ratus empat belas) Kabupaten di Indonesia.

Selanjutnya apabila pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 nanti kembali masuk nominasi 10 (sepuluh) besar nasional lagi atau 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka akan mendapatkan penghargaan berupa ***Parasamya Purnakarya Nugraha*** dari Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon doa dan restu serta dukungan dari semua yang hadir disini dan seluruh masyarakat Purbalingga, agar kita bisa meraih prestasi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013. Segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini, tentu merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta didukung penuh oleh segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (MUSPIDA), dan tentunya hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan keseluruhan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW dan RT serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik dan LSM, insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh *stakeholders* sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yakni tujuan



demokrasi yang menempatkan pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional guna mewujudkan masyarakat madaniah atau civil society; serta tujuan kesejahteraan yang mengisyaratkan agar pemerintahan daerah terus mengupayakan tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis dengan berbasis partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Oleh karena itu, apabila di dalam kami menunaikan amanah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan masih belum memenuhi harapan masyarakat, kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya.

Di sisi lain, kami sungguh bersyukur bahwa kebersamaan warga masyarakat sangat mewarnai berjalannya proses pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga. Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai representasi dari rakyat, dapat berjalan dengan harmonis dan dinamis. Kalaupun terkadang terdapat sedikit tarik menarik, kami rasa masih dalam dinamika yang wajar. Demikian pula suasana damai, aman dan tenteram / kondusif dapat kita rasakan bersama, berkat kiprah dan kerjasama seluruh komponen masyarakat dengan seluruh jajaran aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI / POLRI dalam membangun dan memajukan Kabupaten Purbalingga.

Masyarakat yang semakin kritis dan tanggap terhadap berbagai permasalahan daerah, juga memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh warga masyarakat yang telah ikut mengambil peran di dalam pembangunan Purbalingga.

Akhirnya, kepada Bapak - Ibu Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Pimpinan SKPD, serta Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, seluruh tamu undangan, dan segenap masyarakat Purbalingga yang telah mengikuti dan menyimak dengan seksama Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban Bupati ini, diucapkan terima kasih. Apabila terdapat tutur kata serta hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian serta memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya di Bumi Purbalingga Perwira yang kita cintai ini. Amin-amin Ya Robbal 'alamin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI PURBALINGGA,

Drs. SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO, MM

